



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dapat terselesaikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dalam wujud program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi atas pencapaian serta pertanggung jawaban kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna berhasil guna dan bertanggung jawab serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja disusun untuk menjadi laporan atas kinerja yang mengacu dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menyusun laporan ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran demi penyempurnaan laporan dimaksud, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Tungkal, Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 1968047 198810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	40
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Good Government). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu instansi pemerintah yang baik berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana kerja tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, sebagai salah satu bagian dari SAKIP, yaitu sebagai media informasi pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjab Barat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas serta program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LkjIP Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

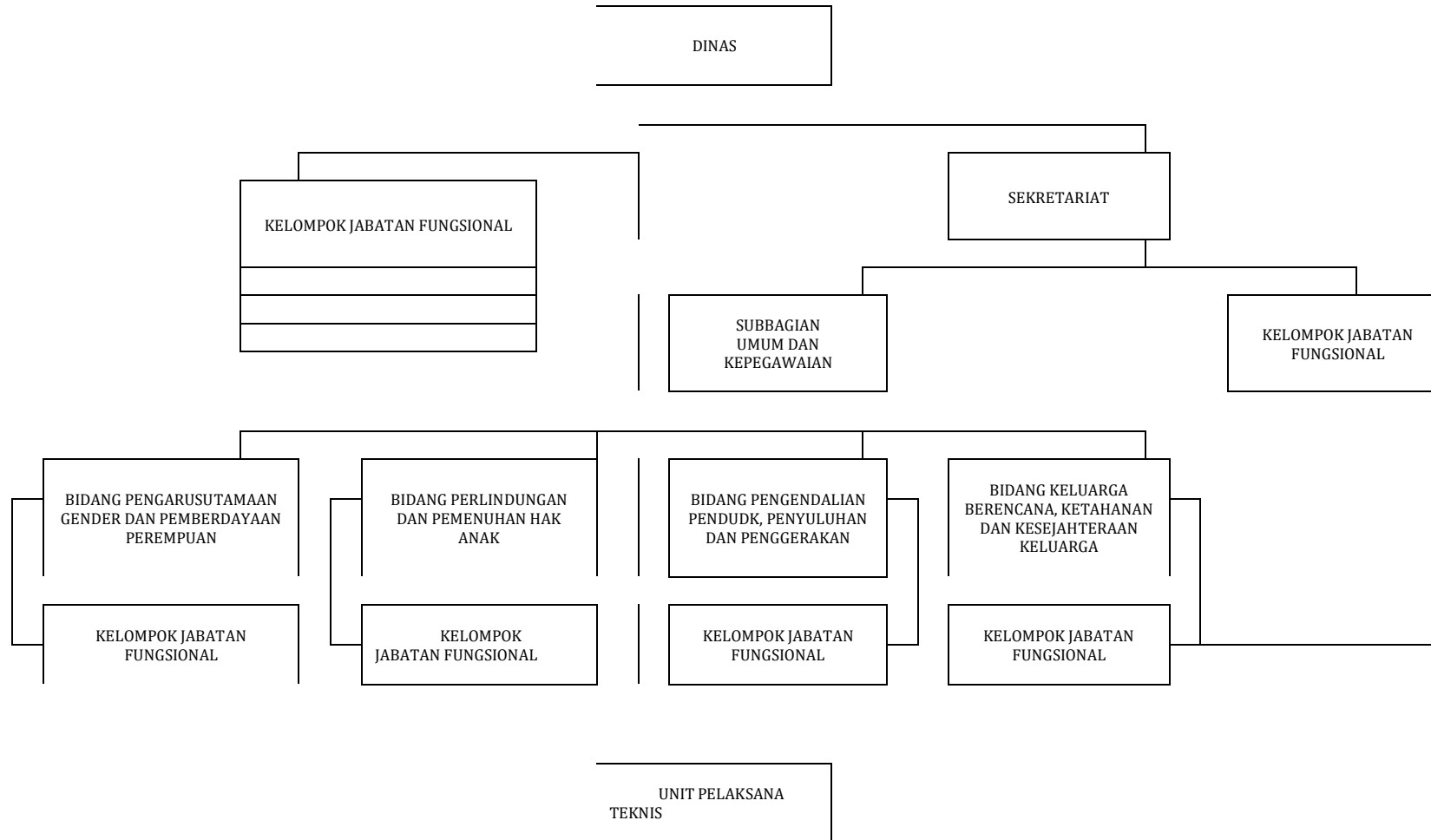
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja
3. Bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan serta pemenuhan hak anak, peningkatan pengendalian penduduk dan pelayanan akseptor KB.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung, adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



D. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dan isu utama Kementerian/Lembaga terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di Kab/Kota
- c. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan
- d. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
- e. Tingginya laju pertumbuhan penduduk

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
- b. Terbatasnya SDM yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat, LSM dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih rendah.
- d. Standar Capaian IPG belum maksimal
- e. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- f. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Merencanakan dan Menyusun alokasi Anggaran untuk menunjang kegiatan menuju Kabupaten Layak anak secara maksimal
- h. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
- J. Masih rendahnya rasio akseptor KB MKJP
- j. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)
- k. Masih rendahnya rasio Petugas Lapangan KB /PKB di setiap Desa/Kelurahan dibandingkan dengan wilayah kerja.
- l. Tingginya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1
- m. Belum optimalnya peran serta anak/remaja pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dalam meningkatkan capaian program Generasi Berencana (Genre)

2. Landasan Hukum,

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 104, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- o. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Sumber Daya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Adapun Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023 berjumlah 48 orang, dengan jumlah PNS 31 orang terdiri laki-laki 12 orang dan perempuan 19 orang dan Non PNS 18 orang terdiri laki-laki 9 orang dan perempuan 9 orang, kemudian ditambah dengan Petugas Lapangan KB (PLKB) PNS berjumlah

14 orang terdiri laki-laki 9 orang dan perempuan 5 orang, serta PLKB/Motivator Non PNS 21 orang terdiri laki-laki 12 orang dan perempuan 9 orang. Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari Eselon II.b;1 orang,Eselon III.a; 1 orang, Eselon III.b; 4 orang, Eselon IV.b; 1 orang dan Jabatan Fungsional Umum 12 orang, Jabatan fungsional Perencana 1 orang , Jabatan Fungsional Tertentu12 orang. Di bawah ini dapat dilihat data kepegawaian berdasarkan Eselon/PLKB/TKK dan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah PNS Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Eselon/JFU dan Pendidikan Tahun 2023

No	Eselon dan JFU	Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan						
			L	P	S-3	S-2	S-1	D-3	SLT A	SLTP	SD
1.	Eselon II.b	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	Eselon III.a	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
3.	Eselon III.b	4	1	3	-	1	3	-	-	-	-
4.	Eselon IV.a	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
6.	Jabatan Fungsional	15	5	10	-	4	10	1	-	-	-
7.	Jabatan Fungsional Umum	9	5	4	-	-	1	-	8	-	-
	Jumlah	31	12	19	-	5	16	1	9	-	-
7.	PLKB PNS	14	9	5	-	-	9	-	5	-	-
8.	Motivator KB(Non PNS)	21	12	9			8	2	11	-	-
9.	TKK	18	6	8	-	-	-	2	12	-	-
	Jumlah	81	44	37	-	2	36	5	38	-	-

4. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	2 unit bangunan di Jl. Jend, Sudirman Kuala Tungkal.
2.	Gedung Balai Penyuluhan KB	14 unit di Desa dalam Kecamatan
3.	Gudang Alokon	
3.	Kendaraan Dinas roda 4(empat: a. Kendaraan Operasional Kadis b. Kendaraan Operasional Kegiatan c. Kendaraan Mupen KB d. Kendaraan Jemput Antar Peserta KB e. Kendaraan Mobil Perlindungan UPT PPA	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit
4.	Kendaraan Dinas roda 2(dua)	15 Unit Dinas 17 Unit di Balai
5..	Peralatan Kantor: a. Komputer b. Laptop c. Printer d. Finger Print e. Air Conditioner(AC) f. Stafol Listrik g. CCTV h. Infocus i. Kipas Angin j. WI-FI k. Scanner	13 unit 9 unit 12 unit 1 unit 12 unit 1 unit 4 set 1 set 2 unit 1 paket 1 Unit

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjab Barat

5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Tahun 2023, yang disusun dari Bab I sampai dengan Bab IV dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi pembahasan Latar belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan Penyusunan Lkkip dan Sumber Daya Manusia serta Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menjelaskan secara ringkas penetapan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. Penutup

Memuat tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra adalah merupakan dokumen turunan dari perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
- b. Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- c. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

2. Kebijakan dan program

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat rencana dan melaksanakan 9 (sembilan) program utama pada Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut adalah:

- a. Program Perlindungan Perempuan Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - 1). Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan ;
Kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - 1) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
- c. Program peningkatan kualitas Keluarga
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - 1) Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kab/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
 - 1). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus.
 - g. Program Pengendalian Penduduk Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - 1). Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsis dengan pemerintah daerah kab/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - 2). Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota
 - h. Program Pembinaan Keluarga Berencana, Kegiatan yang dilaksanakan adalah;
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
 - 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
 - 4) Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
 - i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera, Kegiatan yang dilaksanakan adalah;
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara

berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang dengan Kepala Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bidang. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 7 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama, dengan besaran target sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.60
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00
		- Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.5
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.5
3	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	9
4	Meningkatnya kualitas Keluarga	Angka perceraian	1.0
5	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	699
6	Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/ TFR) per WUS 15-49 tahun	2.45
7	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62.44
		Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	67
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	67.5
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	20.05

Indikator kinerja tersebut diatas untuk pencapaiannya dituangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD dan DAK. Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjab Barat Tahun Anggaran 2023 total anggaran sebesar Rp. 11.707.965.198,- Sumber dana APBD sebesar Rp. 7.301.854.198,- dan DAK sebesar Rp. 4.406.111.000,- Alokasi DAK adalah untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dilaksanakan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

<u>Program:</u>	Anggaran (Rp)
1. Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan	799.599.300.
2. Program Perlindungan Perempuan	110.038.100.
-3. Program Peningkatan kualitas Keluarga	69.958.800,-
4. Program Pemenuhan hak Anak (PHA)	441.582.500
5. Program Perlindungan Khusus Anak	115.369.000
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.602.856.200,-
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.936.589.000,-
8. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.179.798.298,-

J U M L A H **11.707.965.198,-**

Ada 9 (sembilan) program yang ditetapkan tersebut di atas adalah untuk pencapaian sasaran kinerja Tahun 2023 dan masing-masing program dilaksanakan dengan indikator kinerja sasaran serta kegiatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap program dan menjadi perjanjian kinerja eselon IV, sebagai berikut:

Perjanjian kinerja Eselon III

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Bidang
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,60	Sekretaris
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	
		- Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%	
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.50	Kabid Pemberdayaan Perempuan
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,5	
3	Meningkatnya perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	9	Kabid Pemberdayaan Perempuan
4	Meningkatnya kualitas Keluarga	Angka perceraian	1	Kabid Pemberdayaan Perempuan
5	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	699	Kabid Perlindungan Hak Anak

6	Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/ TFR) per WUS 15-49 tahun	2.45	
7	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	67	
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	67,5	Kabid Keluarga Berencana & Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	20.5	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.

Capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah capaian kinerja diperoleh dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi bidang :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Bidang KB dan Ketahanan Kesejahteraan keluarga

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara keseluruhan. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah atau akuntabilitas kinerja ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan secara relative (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

A.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Persentase pemenuhan komponen SAKIP	69,60%	70,82%	101%
		- Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,81	
		- Persentase penurunan hasil Temuan	100%	99,52%	99,52%
2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50	85,79	98,04
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,00	73,20	106
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap Perempuan	9	23	39,13%
4.	Meningkatnya Keluarga	Kualitas Angka Perceraian	1	1,5	66,7%
5.	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	699	601,5	86,05%
6.	Terkendalinya Kuantitas dan Kualitas Penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	- Angka Total kelahiran/(Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,45	2,39	97,55%
6.		- Angka Kelahiran Remaja(Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	67	50,80	93,2%
7.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	- Indeks Pembangunan Keluarga 93% (iBangga)	62,44%	58,20%	93,2%
8.	Kualitas pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	- Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	67,5%	72,3%	107,1%
9.		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi/(Unmeet need)	20,5%	10,6%	193,4%

Capaian target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sebagai realisasi Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja persentase pemenuhan komponen SAKIP dengan target 90% dan realisasi 70,82% dalam kategori BB dengan interpretasi Baik, adalah berdasarkan hasil evaluasi Tim evaluasi atas pelaksanaan AKIP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari laporan hasil evaluasi tersebut bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan SAKIP. Beberapa komponen penilaian SAKIP dapat dipenuhi pada tahun 2023 dengan capaian 101,75 persen dari target, artinya sudah

dilakukan perbaikan sesuai indikator tetapi tetap dibutuhkan penyempurnaan seluruh dokumen agar dapat mencapai hasil maksimal untuk penilaian dan Implementasi Pelaksanaan SAKIP di Dinas P3AP2KB.

Sedangkan indikator kinerja Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat baru mencapai 83,81%, hal ini dapat diketahui dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dinyatakan oleh bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian indikator kinerja persentase penurunan hasil temuan dengan target 100% dan realisasi 95,52%, tingkat capaian ini dapat diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, bahwa ada penurunan jumlah temuan dari Tahun 2022 hasil capaian 89% artinya ada peningkatan penurunan sekitar 6,52%.

- Sasaran Kinerja selanjutnya meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender. Tahun 2023 target IPG sebesar 88,5 sedangkan target IDG sebesar 69,5. Realisasi/capaian IPG Tahun 2023 masih sama dengan kondisi Tahun 2022 yaitu realisasi IPG sebesar 86,17. Dilihat dari capaian target maka realisasi IPG belum tercapai dari target 88,5 (kurang 2,33), namun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 85,79 maka mengalami kenaikan sebesar 0,38. Selanjutnya untuk IDG pada kondisi Tahun 2023 dengan realisasi/capaian masih sama dengan kondisi Tahun 2022 yaitu realisasi IDG sebesar 73,46. Dilihat dari capaian target maka realisasi IDG melebihi dari target 69,5 (naik 3,96), dan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 73,20 mengalami kenaikan sebesar 0,26. Untuk Tahun 2023 data IPG dan IDG perhitungannya dilakukan pada pertengahan Tahun 2024 yang disusun oleh BPS Provinsi Jambi, maka data tahun 2023 masih menggunakan data Tahun 2022. IPG adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain : (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Perkapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai menejer, profesional, administrasi dan teknis serta sumbangan perempuan dalam pendapatan.
- Sasaran kinerja meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Sasaran kinerja meningkatnya perlindungan perempuan dan anak capaian indikatornya yaitu Ratio kekerasan terhadap perempuan dengan target 9 rasio. Pada Tahun 2023, perempuan yang mengalami kekerasan berjumlah 37 orang dari total 42 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, sehingga

diperoleh angka ratio kekerasan sampai akhir Tahun **2023** adalah **23**. Jika dibandingkan ratio kekerasan terhadap perempuan pada Tahun **2022** yaitu **14** dengan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 23 orang dari 23 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, maka terdapat kenaikan sebesar **9** poin. Persentase capaian antara realisasi dan target mencapai 255,55%, artinya keadaan ini sudah sangat serius dan harus menjadi perhatian bersama khususnya para pengambil kebijakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecendrungan meningkatnya Kasus kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini seperti fenomena gunung es, dimana data yang disajikan adalah hasil laporan dari pihak korban baik secara langsung, melalui laporan masyarakat, dan Laporan melalui Aplikasi berbasis elektronik / SINPAN (Sistem Informasi pengaduan Perempuan dan Anak) dan hal ini juga merupakan salah satu keberhasilan dari edukasi yang dilakukan ke desa-desa kepada masyarakat terkait tentang kekerasan, sehingga masyarakat sudah paham dan berani untuk melapor kasus yang terjadi ke UPPA Polres Tanjung Jabung Barat maupun ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan juga disebabkan oleh budaya patriarki, ketidakadilan gender, kualitas hidup rendah, pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak mendidik/penggunaan media social dan gangguan psikologis-jiwa.

- Sasaran kinerja meningkatnya kualitas keluarga capaian indikatornya yaitu angka perceraian dengan target 1 dengan Cerai Gugat sebanyak 392 kasus dan Cerai Talak sebanyak 101 Kasus dengan total jumlah perceraian sebanyak 493 kasus (*sumber data dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal*), jadi capaian pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,5. Dilihat dari kondisi tersebut, kasus perceraian (cerai gugat dan talak) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari target 1 dengan realisasi 1,5. Tentu saja kondisi ini kurang baik dikarenakan terjadi peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga diperlukan optimalisasi dalam sosialisasi/penyuluhan terkait ketahanan keluarga dan perceraian.
- Kabupaten Layak Anak Tahun (KLA) 2023 dengan nilai 601,5 (Peringkat Madya). Permasalahan dalam meningkatkan Kabupaten Layak Anak (KLA) : (a) Regulasi belum banyak memiliki Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) pada setiap indikator. (b) Belum semua kegiatan dilaksanakan pada setiap indikator sehingga tidak ada dokumen pelaksanaan untuk dimasukkan penilaian. (c) Belum banyak inovasi dalam memenuhi hak anak pada setiap indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan pada setiap OPD. Upaya Pemecahan Masalah : (a) Semua OPD/Instansi vertikal harus melaksanakan kegiatan sesuai indikatornya masing-masing. (b) Membuat inovasi dalam pemenuhan hak anak

dan diimplementasikan dalam kegiatan sehingga terkumpul epidem-epidem untuk penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun yang akan datang.

➤ **Angka TFR (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 Tahun.** TFR ditergetkan pada tahun 2023 sebesar 2.45 kelahiran per wanita usia subur dan menjadi 2.39 pada tahun 2023 (*Sumber data BPS/SP 2020*). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026. Adapun upaya penurunan TFR dapat dilakukan dengan :

(a) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun (Program GenRe), semakin tinggi usia kawin pertama, akan menurunkan tingkat fertilitas/kelahiran.

(b) Tingkat pendidikan perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan berpengaruh signifikan dengan tingkat fertilitas/kelahiran.

(c) Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan pendanaan usaha mikro kecil menengah yang mendukung perekonomian masyarakat. Meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada turunnya angka fertilitas.

(d) Mengintensifkan wajib belajar 12 tahun, penurunan biaya pendidikan serta subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dalam upaya menunda pernikahan terutama bagi remaja.

(e) Strategi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB MKJP seperti IUD, Implant, MOW dan MOP.

(f) Meningkatkan kelompok kegiatan (Poktan) secara kualitas dan kuantitas, diantaranya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R , serta UPPKA.

Permasalahan : masih adanya usia perkawinan anak/usia muda.

Penghambat :

(a) pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.

(b) masih berpegang teguh dalam budaya atau stigma banyak anak, banyak rejeki.

Pendorong :

(a) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan.

(b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan.

(c) Pengembangan sektor ekonomi seperti UPPKA.

➤ **Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).** ASFR 15-19 tahun menunjukkan indikator kelahiran

/ fertilitas pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun. Hasil SP2020 menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan angka 50,80 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun, sementara target 67 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun. Data tersebut menunjukkan hasil capaian lebih tinggi dari target yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan indikator ini melebihi dari target dengan persentase realisasi sebesar 133,8 persen. Hal ini karena ASFR 15-19 tahun berkaitan erat dengan perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan juga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi usia dini. ASFR 15-19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja program Bangga Kencana diseluruh tingkat wilayah. Kebijakan untuk menurunkan ASFR 15-19 tahun harus melibatkan berbagai sektor terkait agar secara bersama-sama peduli untuk menurunkan angka ASFR 15-19 tahun. Upaya penurunan ASFR 15-19 tahun dapat dilakukan dengan pendewasaan usia perkawinan melalui peningkatan usia lama sekolah anak perempuan/ meningkatkan program wajib belajar 12 tahun/SMA, partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja. DP3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan hal tersebut melalui berbagai strategi seperti Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Ketahanan Remaja, UU pernikahan no 19 tahun 2019. Permasalahan tingginya keluarga pra sejahtera 7411 KK dan Keluarga sejahtera I 32974 KK. Penghambatnya terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi dan kehamilan yang tidak diinginkan/pergaulan bebas pada remaja.

- **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).** Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Dengan demikian i-Bangga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan / program / kegiatan diwilayahnya. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diketahui bahwa target i-Bangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah 62,44 dengan realisasi capaian 55,83 (*Sumber data: Parameter Bangga Kencana 2022*). Nilai i-Bangga menurut dimensi dibagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Capaian ini

mengindikasikan bahwa peran, fungsi dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait, meningkatkan komitmen dan sinergitas antar Instansi/dinas terkait lainnya serta pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, serta perlu digencarkannya sosialisasi i-Bangga hingga keseluruhan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Permasalahan masih ditemukan masalah social seperti kemiskinan. Penghambat menurunnya hasil komoditi perkebunan seperti pinang, dan banyaknya kasus usia perkawinan dini.

- **Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun** Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* selanjutnya disebut mCPR, adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intra-Uterine Device* (IUD), susuk (*implant*), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Target mCPR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah 67,5 %, sedangkan realisasi capaian sebesar 72,3%. Dilihat dari data tersebut diatas, untuk target mCPR sudah tercapai dan melebihi dari target. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, diantaranya : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (a) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (b) Tempat konseling / akses yang mudah dengan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (Obgyn Bed, IUD KIT, Implan KIT); (c) Menggiatkan program safari KB; (d) Memperkuat sistim logistik (alat dan obat kontrasepsi/Alokon) diberbagai tingkatan terutama memastikan distribusi dinamis di kabupaten/kota; (e) Serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, media, dunia bisnis, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi. Permasalahan kurangnya tenaga lini lapangan/PLKB. Penghambatnya

kurangnya pengetahuan tentang program KB dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB serta Drop Out akseptor KB (putus pakai akseptor KB).

- **Cakupan pasangan usia subur (pus) yang ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmeet need).** Unmet Need KB / kebutuhan KB yang tidak terpenuhi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan menggunakan kontrasepsi apapun. Target unmet need pada tahun 2023 adalah 20,5 dan capaian 10,6 pada tahun 2023. strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, antara lain : (a) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (b) Tindaklanjuti kelangsungan kesertaan ber-KB/mencegah drop out (putus pakai) ber-KB; (c) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (d) Meningkatkan layanan (sarana dan prasarana) program KB dan kesehatan reproduksi; (e) Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sesuai dengan keinginan akseptor / pilihan metode kontrasepsi; (f) Meningkatkan peran serta suami dalam ber-KB. Permasalahan belum optimalnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang(MKJP), ketersediaan alokon yang sesuai dengan keinginan akseptor KB. Penghambat rasa takut pada efek samping dari ber-KB seperti rasa nyeri, kegemukan. Masih rendahnya partisipasi suami yang ber-KB. PUS merasa sudah tua. Kurangnya tenaga medis yang berkompeten dalam pemasangan KB MKJP. Pendorongnya adanya program metode operasi pria (MOP).

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,5	86,17	97,36 %	85,79
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,5	73,46	105,69 %	73,20
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio kekerasan terhadap Perempuan	9	23	39,13 %	14
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian	1	1,5	66,66 %	1,6
4.	Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	699	601,50	86,05 %	575
5.	Terkendalinya Kuantitas dan Kualitas Penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,45	2,39	102,5 %	2,37
		- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	67	50,80	133,8 %	34,85
6.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,44	58,20	93,2%	53,82
		- Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	67,5	72,3	107,1 %	64%
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi/(Unmeet need)	20,5	10,6	193,4 %	16%

Perbandingan capaian kinerja pada indikator kinerja antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Tahun 2023 target sebesar 86,50 dan realisasi sebesar 85,68 maka tingkat capaian 99,05%. artinya realisasi Tahun 2023 adalah masih sama dengan Tahun 2019 dan mengalami penurunan dari angka IPG Tahun 2018 yaitu 85,87, penurunannya sebesar 0,19 point. Diharapkan IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai angka

100 yang artinya tidak terjadi lagi kesenjangan pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan antara laki-laki dan perempuan.

Demikian dengan Indikator IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat target 2023 sebesar 61,01 dan realisasi Tahun 2023 sebesar 68,31 artinya realisasi Tahun 2023 masih sama dengan IDG Tahun 2019, akan tetapi mengalami peningkatan dari angka IDG pada tahun 2018 yaitu 63,10, peningkatannya sebesar 5,21 point. Diharapkan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai angka 100 yang

menggambarkan peran serta perempuan dalam pembangunan dibidang politik, ekonomi serta sebagai tenaga profesional dibidang ketenaga kerjaan sudah tinggi.

Tolok ukur keberhasilan sasaran kinerja meningkatnya perlindungan terhadap perempuan adalah penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan tabel 3.2 diatas terlihat bahwa realisasi capaian penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 60% sedangkan penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 hanya mengalami penurunan sebesar 40%.

Penurunan Ratio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 menggambarkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan pada tahun 2023 eningkat. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan sebanyak 42 kasus dengan jumlah perempuan sebagai korban sebanyak 37 dengan ratio kekerasan 18, dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 28 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 20 dan ratio kekerasan adalah 12, artinya terjadi peningkatan ratio kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan meningkat 5 kasus di Tahun 2023 .

Perkembangan Ratio Kekerasan terhadap perempuan dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.3

Tabel 3.3 Perkembangan Ratio kekerasan terhadap perempuan Tahun 2019-2023

Tahun	Ratio Kekerasan
2019	25(16%)
2020	28(17,38%)
2021	30(19,54%)
2022	29(18,68)
2023	23 939,13%)

Sumber Data: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan UPT PPA DP3AP2KB

Adapun perkembangan kasus kekerasan dari Tahun 2019 s/d 2023 dan jumlah kekerasan berdasarkan jumlah pelaku dan korban Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Kasus Kekerasan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 s.d 2023

NO.	JENIS KASUS	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	4	6	1 4	8	9
2.	Kekerasan Seksual	13	15	16	11	23
3.	Kekerasan Fisik	1	8	7	1	6
4.	Kekerasan Psikis	0	2	7	3	11
5.	TPPO	0	0	0	2	2
6.	Lainnya	1	0	0	0	0
	Jumlah	32	31	44	34	42

Sumber Data: Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB

Tabel 3.5
Jumlah Kekerasan berdasarkan jumlah Pelaku dan Korban Tahun 2023

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah	Pelaku		Korban	
			Lk	Pr.	Lk	Pr.
1.	Fisik	10	7	2	3	7
2.	Psikis	3	1	1	1	2
3.	Seksual	11	12	0	0	11
4.	Penelantaran	2	2	0	1	1
5.	TPPO	2	1	0	1	1
6.	Lainnya	1	0	1	0	1
	Jumlah	29	23	4	6	23

Kasus kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2023 naik turun, pada tahun 2023 terjadi penurunan dari 44 kasus pada tahun 2022 turun menjadi 34 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemberian edukasi secara terus menerus mulai mendapatkan hasil walaupun belum maksimal tetapi secara kasus ada penurunan yang terjadi, dan hal ini akan terus dilakukan sebagai upaya penekanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada kasus kekerasan terhadap anak Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5.1
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada Tahun 2017 - 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



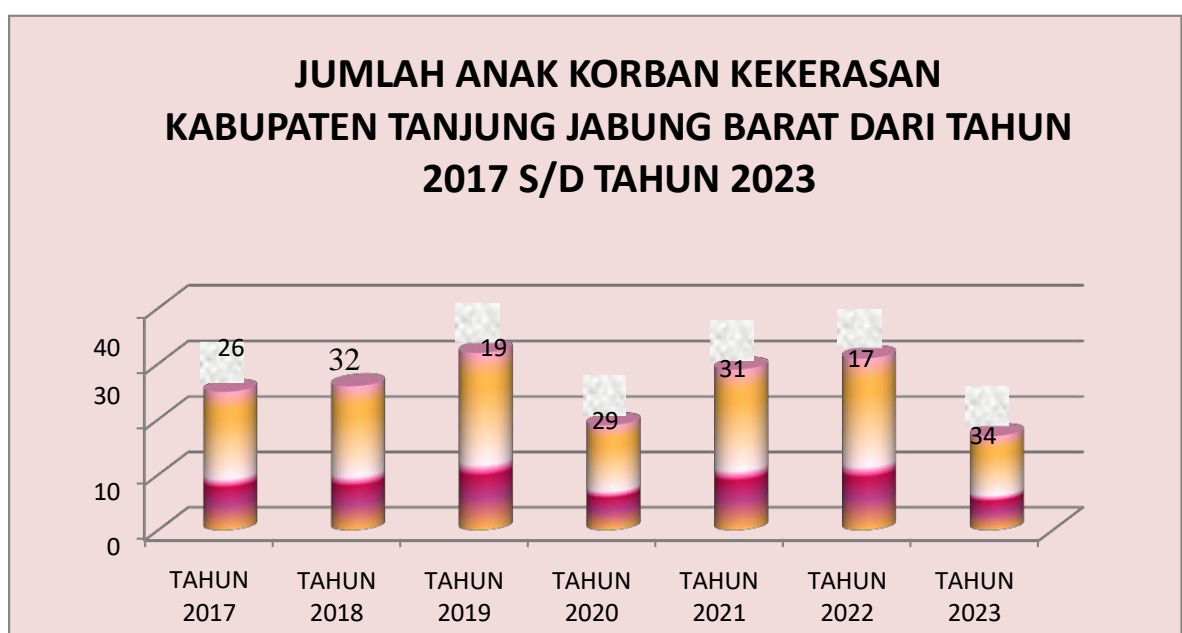
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 35 %, penurunan ini merupakan buah dari berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan bersama-sama lintas sektor tetapi meskipun data menunjukkan adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak, namun angka tersebut masih

memprihatinkan. “Kita tidak boleh berpuas hati dan berhenti di sini. Perjalanan kita masih panjang. Seharusnya, tidak boleh ada satu pun anak yang mengalami kekerasan, apapun alasannya. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak untuk memperkuat kembali sinergi dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Sekecil apapun upaya yang kita lakukan, jika dilakukan secara bersama-sama, pasti hasilnya akan luar biasa.

Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak banyak disebabkan oleh penggunaan media sosial, dimana anak-anak memanfaatkan waktu luang dengan bermain hp tanpa kontrol dari orang tua. Untuk mengurangi pengaruh media sosial perlu strategis dalam menguatkan fungsi dan peran keluarga dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah. Kapasitas keluarga perlu diperkuat terutama fungsi keluarga dalam mendampingi anak . "Meskipun tidak mudah, dengan upaya maksimal dan kerja sama sedini mungkin dan memperkuat peran serta sekolah, keluarga, dan masyarakat, seharusnya kita mampu bersama-sama mengatasi kasus kekerasan terhadap anak selain itu perlu kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) dan kepolisian untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak lewat dunia maya.

Jumlah korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi dan tahun 2020 serta tahun 2021 mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 penurunan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 5.2
Jumlah Anak korban kekerasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 s/d Tahun 2023.



Korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 65,30% dari tahun 2022, dimana setiap tahunnya kasus kekerasan

seksual selalu

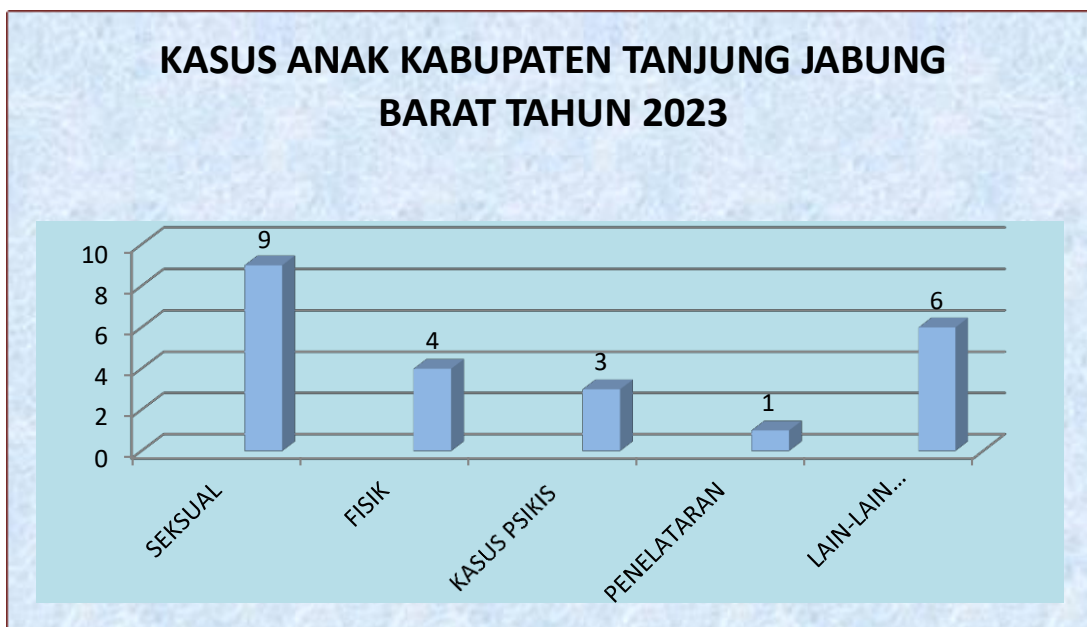
tertinggi. Pada tahun 2023 korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 53 % dari total anak yang mengalami kekerasan . Korban kekerasan terhadap anak setiap tahunannya diatas 61,7 % adalah perempuan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2017 s/d 2023

No	Tahun	Korban		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2017	8	18	26
2.	2018	6	28	34
3.	2019	6	14	20
4.	2020	3	26	29
5.	2021	9	22	31
6.	2022	7	10	17
7.	2023	13	26	39

Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dan jenis kekerasan yang terjadipun bervariasi, untuk jelasnya dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5.3
Jenis kasus anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023



Jenis kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), persetujuan dan pelecehan seksual.

Tabel 5.2
Jenis kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban kekerasan berdasarkan jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penelantaran Anak	0	0	0	0
2.	Seksual	21	5	20	25
3.	Fisik	5	5	0	5
4.	Psikis	6	3	3	6
	Total	22	13	23	36

Selain jenis kekerasan diatas kasus anak yang lain yaitu kasus anak berhadapan dengan hukum berjumlah 6 kasus karena lakalantas, pencurian dan pelaku persetubuhan/pelecehan seksual. Untuk kasus yang berhadap dengan hukum melalui P2TP2A berkerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres telah memberikan pendampingan pengacara, psikologis dan usaha diversifikasi (3 kasus berhasil diversifikasi).

Rasio kekerasan terhadap anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 adalah 2,97 (Target 3) dengan tingkat capaian 99,2 % (jumlah anak korban kekerasan/jumlah seluruh anak X 10.000) (31 anak / 104.216 * 10.000) dan tahun 2023 yaitu 0,52 (target 2) dengan tingkat capaian 26 % (17 anak/324.456*10.000). Namun data ini belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena perhitungannya dibuat berdasarkan data kasus yang melaporkan ke UPPA Polres dan P2TP2A Kab.Tanjung Jabung Barat . Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan budaya kearifan lokal seperti korban malu membuat pengaduan ke pihak yang berwenang (P2TP2A/UPPA Polres) karena dianggap aib keluarga, belum semua masyarakat tersosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan belum semua Desa/Kelurahan memiliki Forum Anak Daerah (PATBM) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sementara desa/kelurahan yang sudah memiliki FAD dan PATBM belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

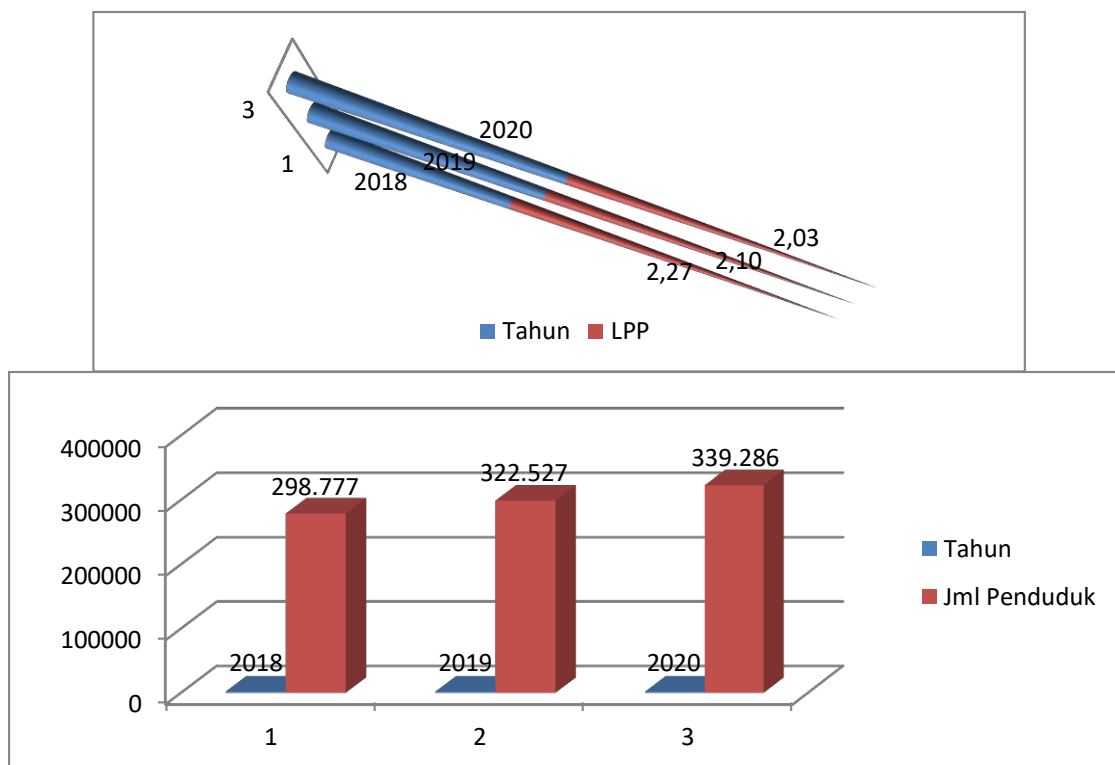
Untuk indikator Status Capaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 target Skor 500 dan realisasi Skor 500 maka tingkat capaian 100%. Tercapainya target Skor 500 dikarenakan adanya peningkatan pemahaman, koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Pengumpul Data tentang Indikator Kabupaten Layak Anak serta diadakannya pertemuan pengumpulan data secara rutin. Lebih dari 50% tingkat Kecamatan sudah melakukan Deklarasi Kecamatan layak Anak (KELANA) serta semua Kecamatan sudah menginstruksikan ke setiap Desa-nya agar mengumpulkan

data Desa/Kelurahan layak Anak (DEKELA). Untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak dengan Skor 599(Pratama) sampai dengan Tahun 2023 maka upaya yang dilakukan yaitu Tim Pengumpul Data yang ada pada Perangkat Daerah harus mengoptimalkan dalam mengumpulkan data indikator Kabupaten Layak Anak, kemudian memaksimalkan pemenuhan indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dengan mengimplementasikan data DEKELA dalam anggaran Desa/Kelurahan serta melibatkan Forum Anak Daerah(FAD), Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat(PATBM) baik pada pengumpulan data DEKELA dan pelaksanaan anggaran tersebut.

Dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana salah satu upaya mengendalikan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk, dengan meningkatkan akselerasi terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan indeks pembangunan keluarga berwawasan kependudukan, mengintegrasikan strategi pengendalian penduduk dengan memadukan dan sinkronisasi kebijakan, meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu dan dampak kependudukan yang trendnya cenderung semakin meningkat perkembangannya dari tahun ke tahun.

Adapun perkembangan penduduk dan laju pertumbuhannya dapat dilihat gambar di bawah ini.

Grafik 1
Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 – 2023



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan sector kependudukan setiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dapat dikendalikan.

Pada tahun 2023 capaian indikator laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%, sedangkan tahun 2019 sebesar 2,10 % dari target sebesar 2,19 %. Artinya Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 dapat ditekan sebesar 0,16 % dibanding tahun 2019 yang hanya 0,19%. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi dari jumlah kelahiran (*birth*), dan kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Pada tahun 2023 terjadi kelahiran sebesar 5.813 jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 6.353 jiwa, terjadi penurunan kelahiran sebesar 540 jiwa. Mobilitas penduduk juga cukup tinggi, rata-rata per 1000 orang penduduk jumlah migrasi masuk sebesar 12,22 dan jumlah migrasi keluar sebesar 12,17. Sedangkan capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2023 sebesar 2,85 dan tahun 2019 sebesar yaitu 2,69 dari target 2,59. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita usia 15-49 tahun sampai akhir masa reproduksinya masih berkisar di angka 3-4 anak, belum mencapai target yang diinginkan yaitu bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang wanita usia 15-49 tahun sampai akhir masa reproduksinya adalah 2-3 anak atau 2,59, optimalnya mendekati TFR Provinsi Jambi yaitu 2,3 (SDKI). Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang (PTS) sebaiknya TFR berada di angka 2,0 artinya rata-rata per wanita (15-49) punya 2 anak.

Masih relative rendahnya capaian kinerja indikator Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilihat perkembangannya pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Program Kependudukan,
Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
2020 – 2023

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021	2023
1	2	3	4	5
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,10	2,03	1.3
2.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,69	2,59	2,37
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraception Prevelence Rate/CPR)	84,25	85,00	64%
4.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9,19	9,19	16%
5.	Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	69	69	34,85

6.	Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)	15,79	15,79	2,37
----	---	-------	-------	------

Sumber: Bidang Dalduk dan KB DP3AP2KB Kab. Tanjab Barat

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Capaian Indikator Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata pertumbuhannya tiga tahun terakhir cukup baik.

Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) tahun 2023 juga mengalami sedikit penurunan, dari 51.510 Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi sebesar 84,20% terjadi penurunan sebesar 0,05%. Penurunannya ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mau tidak mau harus menerapkan social distancing serta mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian harus ada upaya ekstra untuk meningkatkan penyuluhan dan pelayanan prima dalam rangka menekan jumlah akseptor Drop Out sehingga efektif menaikkan peserta KB aktif. Capaian target Unmet need di tahun 2023 sebesar 9,66%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9,19%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,47%. Tidak cukup dengan pelayanan KB yang berkualitas dan dukungan sarana prasarana yang memadai, tetapi juga harus dibarengi dengan kegiatan advokasi KIE yang intensif oleh penyuluh KB atau Kader.

Dari uraian di atas, dapat disampaikan beberapa permasalahan dan yang menyebabkan capaian target indikator Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga belum tercapai peningkatan dan penurunannya secara signifikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu masih di angka 2,10 dan Angka Kelahiran Total (TFR) masih di angka 2,69, disebabkan masih kurangnya kerjasama, pemahaman dan kesadaran institusi/lembaga dan masyarakat tentang Isu dan dampak kependuduk serta kemanfaatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hanya 21,54% selebihnya 78,46% menggunakan Non MKJP, hal ini dikarenakan pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan MKJP yang relative masih rendah serta keterbatasan kemampuan pemenuhan pelayanan MKJP kepada masyarakat, terutama masyarakat Pra Sejahtera dan sejahtera I.
3. Masih relative tingginya Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*) dan tingkat Ketidak berlangsung Pemakaian Kontrasepsi, disebabkan masih kurangnya fasilitasi dan dukungan sumber daya di semua tingkatan serta masih belum optimalnya pemberdayaan institusi/lembaga/kelompok-kelompok

kegiatan masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan dan penyebab capaian target indikator Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang belum tercapai peningkatan dan penurunannya, terutama Laju Pertumbuhan Penduduk dan TFR yang masih di atas angka 2 menjadi di bawah angka 2, dan Penggunaan Kontrasepsi MKJP dapat ditingkatkan, serta Angka Unmet Need dan Putus Pakai dapat diturunkan secara signifikan, sangat perlu dilakukan upaya-upaya dan solusi sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama, sinergitas dan intensitas fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, advokasi pergerakan dan KIE kepada masyarakat, terutama masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, baik secara formal, informal dan non formal di semua tingkatan.
2. Peningkatan penyuluhan dan konseling kemanfaatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta pembinaan dan pengayoman terhadap masyarakat, Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB/akseptor KB dan Wanita Usia Subur 15-49 tahun.
3. Peningkatan Pemberdayaan Institusi masyarakat dan kelompok-kelompok kegiatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga Lini Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PKB/PLKB PNS/Non PNS/PPKBD/Sub PPKBD) secara ideal dan proporsional, guna penguatan kapasitas dan kemampuan pelayanan lini lapangan dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Renstra.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Renstra dengan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi Ta.2023	Tkt. Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kestaraan Gender	Indek Pembangunan Gender (IPG)	90	85,79	95.32
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	71	73.20	103
2.	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	1	14	7.14
3.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	Predikat capaian Kabupaten Layak Anak	845	575	68.04
4.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	66.68	53.82	80.71
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.3	2.37	97.04
		Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate (CPR))	70.1	64%	91.29
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.05	16	106
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	64	34.85	54.45

A. 4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

Tingkat keberhasilan yang menjadi pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023, dapat disampaikan yaitu jika dilihat dari alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing 10 (sepuluh) program yang ditetapkan Tahun Anggaran 2023, bahwasanya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD Tahun 2023, realisasi keuangan capaiannya secara keseluruhan mencapai 86.51% dan fisik 94.19%. Karena pencapaian pelaksanaan program ini adalah merupakan

keberhasilan yang menjadi kinerja dari pada Perangkat Daerah, maka penyebab keberhasilan dimaksud adalah sebagai berikut:

Permasalahan dalam mencapai Indeks Pembangunan Gender (IPG):

- a. Regulasi Daerah dan komitmen untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih kurang
- b. Koordinasi lintas sektor melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal.
- c. Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- d. Masih kurangnya SDM terlatih untuk PPRG dan penyediaan/pemanfaatan data pilah dalam pengambilan keputusan masih belum optimal.

Solusi dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender:

- a. Menyusun regulasi daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan IPG, mengoptimalkan kinerja kelompok kerja PUG, Focal Point untuk meningkatkan daya ungkit komponen IPG.
- b. Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) melalui PPRG dan ARG dan penyusunan/pemanfaatan data pilah oleh OPD.

Permasalahan mencapai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- a. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30%
- b. jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, manejer,administrasi dan teknis masih kurang, serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih kurang.

Solusi dalam upaya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender(IDG):

- a. Menyusun regulai daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan IDG, meningkatkan kompetensi perempuan agar mampu berperan di sektor ekonomi dan politik.
- b. Penguatan kemitraan dan jejaring untuk meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi perempuan.

Permasalahan pencapaian penurunan ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a. Masih rendahnya komitmen stakeholder untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Belum optimalnya kinerja unit layanan penanganan pengaduan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
- d. Masih kurangnya SDM terlatih dalam pelayanan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.

Solusi dalam upaya menurunkan ratio kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak:

- a. Menyusun regulasi daerah dan komitmen stakeholder untuk mendorong peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak.
- b. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Melakukan penguatan kelembagaan unit layanan di tingkat Kecamatan dan Desa serta menjalin kemitraan dengan perusahaan
- d. Penguatan kemitraan dan jejaring kerja dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat.

Dalam hal perkembangan sektor Keluarga Berencana ini ada beberapa masalah yang menyebabkan adanya penurunan peserta KB Aktif dan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu:

- Peserta KB Aktif ada yang ingin segera memiliki anak atau ingin hamil dan Peserta KB ada yang tidak cocok dengan salah satu alat, obat Kontrasepsi, karena memiliki penyakit hipertensi dan lainnya.
- Masih terbatasnya tenaga lini lapangan (PKB/ PLKB/ Motivator).
- Masih relative rendahnya pemahaman kader/ masyarakat/ keluarga/ Pasangan Usia Subur (PUS)/ Wanita Usia Subur (WUS) tentang tujuan dan manfaat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

***Solusi :**

1. Menambah Penyuluh/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) atau motivator Keluarga Berencana sehingga kedepannya petugas keluarga berencana semakin kuat sekaligus mampu mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi, advokasi dan penggerakan terutama tentang pentingnya program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Aparatur dan anggaran yang tersedia, untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan dari pada aparatur) serta belanja Langsung (pelaksanaan pembangunan/ program dan kegiatan). Adapun belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan alokasi anggaran setiap tahunnya. Adapun anggaran program dan

kegiatan yang dinyatakan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 antara Bupati Tanjung Jabung Barat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

a. Alokasi Anggaran per sasaran strategis dan indikator kinerja :

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan APBD Perubahan 2023 diperbandingkan dengan total jumlah anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per - Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Proporsi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan komponen SAKIP Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penurunan hasil temuan	5.108.107.210	40,24%
2.	Meningkatnya implementasi PengarusUtamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	609.173.913	4,79%
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Persentase penurunan Ratio kasus kekerasan terhadap perempuan Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	54.055.400	0,42%
4.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak dan kualitas perlindungan anak	Status capaian Kabupaten Layak Anak Rasio kekerasan terhadap anak	146.164.480	1,15%

5.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	<p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>Angka kelahiran total(Total Fertility Rate/TFR) per WUS(15-49 tahun)</p> <p>Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate(CPR))</p> <p>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need)</p> <p>Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)</p> <p>Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)</p>	6.776.149.205	53,38%
	Jumlah		12.693.650.208	100,00

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan program/Kegiatan

Dalam hal mencapai kinerja yang telah ditetapkan sesuai sebagaimana yang telah disajikan di atas, maka Tahun 2023 program strategis dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak:
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah, didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 11.707.965.198,- realisasi sebesar Rp. 11.146.951.825,- atau 95,21% yang bersumber dari dana APBD dan DAK BOKB.

Kemudian anggaran yang ditetapkan tersebut adalah merupakan Belanja Langsung Pembangunan sedangkan Belanja Tidak langsung adalah merupakan Belanja Pegawai (Gaji ASN) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.990.510.278,- realisasi sebesar Rp. 3.779.812.653 atau 94,72%.

Adapun anggaran pembiayaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rincian Belanja Langsung dan Realisasi Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2023	%
1	BELANJA	11.707.965.198,-	11.146.951.825,-	95,21
1.1	BELANJA OPERASI	11.604.633.198,-	11.043.624.825,-	95,21
1.	BELANJA PEGAWAI	4.159.090.278,-	3.948.392.653,-	94,93
2.	BELANJA BARAN DAN JASA	7.445.542.920,-	7.095.232.172,-	95,30
2	BELANJA MODAL	103.332.000,-	103.327.000,-	100
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.332.000,-	103.327.000,-	100
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
	JUMLAH	11.707.965.198,-	11.146.951.825,-	95,21

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah merupakan dokumen laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati, kemudian menyampaikannya kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi, kebijakan serta wewenang yang dimiliki.

Wujud pertanggung jawaban dimaksud berupa hasil capaian indikator sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilakukan dengan program yang dijabarkan dalam kegiatan, kemudian diukur tingkat pencapaian kinerja melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka keseluruhan proses tersebut dituangkan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun.

Demikian laporan kinerja ini dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan sangat disadari dalam penyusunannya belum sempurna, sehubungan dengan itu diharapkan adanya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini, dalam upaya perbaikan untuk masa yang akan datang, dan laporan kinerja ini semoga bermanfaat, juga dapat lebih meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs.H. MUHAMMAD YUNUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001